

Uang Pengganti Korupsi Rp 26 Miliar Belum Dibayar

PLEBURAN - Rp 26 miliar uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi di Jateng belum diselamatkan dan masih menunggak karena belum dibayar. Dari keseluruhan tunggakan tersebut, terbesar ada di Kejari Semarang senilai Rp 19 miliar. Upaya penyelamatan terus dilakukan kejaksaan, salah satunya mengajukan gugatan hukum.

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jateng Mia Aminati mengungkapkan, upaya gugatan kepada para terpidana kasus korupsi diharapkan bisa mengembalikan uang negara.

"Totalnya Rp 26 miliar. Tunggakannya paling besar di Kejaksaan Negeri Semarang sekitar Rp 19 miliar dan langkah untuk menyelamatkan uang negara juga terus dioptimalkan kepada para terpidana," ujar Mia, Jumat (31/10) di ruang kerjanya.

Mia mengatakan, sejauh ini

Bersambung ke hal 21 kol 3

Uang.....

(Sambungan hlm 17)

pihaknya berhasil memulihkan kekayaan negara dari bidang pidana khusus sebesar Rp 107 juta. Sementara penyelamatan kekayaan negara sebesar Rp 6 miliar.

"Mayoritas dari pengembalian hak pakai lahan yang dimiliki Perusda. Karena sewa tanah dari awal murah, sehingga Pemprov mengeluarkan

Perda dan hasilnya sesuai petunjuk dewan bisa dialihkan ke HGB (hak guna bangunan). Dari situ diperoleh pengembalian uang tersebut," kata Mia.

Terkait upaya penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, Mia Amiati memerintahkan seluruh aparat harus mengajukan gugatannya. "Sesuai perintah semua aparat wajib mengajukan gugatan karena karakter pidana. Seperti tunggakan Kejari Sema-

rang sebesar Rp 19 miliar dan baru akan mulai mengajukan gugatan dan gugatan bisa diajukan ke ahli waris," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menilai upaya penyelamatan uang negara yang dilakukan kejaksaan masih belum optimal.

"Rasanya tidak sebanding

dengan apa yang telah dikerjakan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi," ujar dia.

Eko menambahkan, terkait penyelamatan uang negara pihak kejaksaan harus lebih terbuka termasuk juga dalam hal audit BPK. "Apakah ini langsung masuk kas negara atau kadang-kadang disimpan di rekening dulu. Perlu transparansi dan tentunya audit dari instansi yang berwenang," katanya. ■

rdi-Ks